

**ANALISIS KINERJA EKONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PEMEKARAN**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**FEBRI HASTARI ARIFTIAN**

**312031522**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

# TUGAS AKHIR

## ANALISIS KINERJA EKONOMI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**FEBRI HASTARI ARIFTIAN**

**No Induk Mahasiswa: 312031522**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

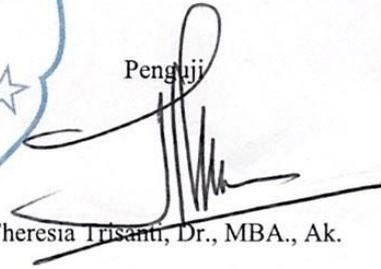
### Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Baldric Siregar, Prof., Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Penguji



Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 17 Januari 2022  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



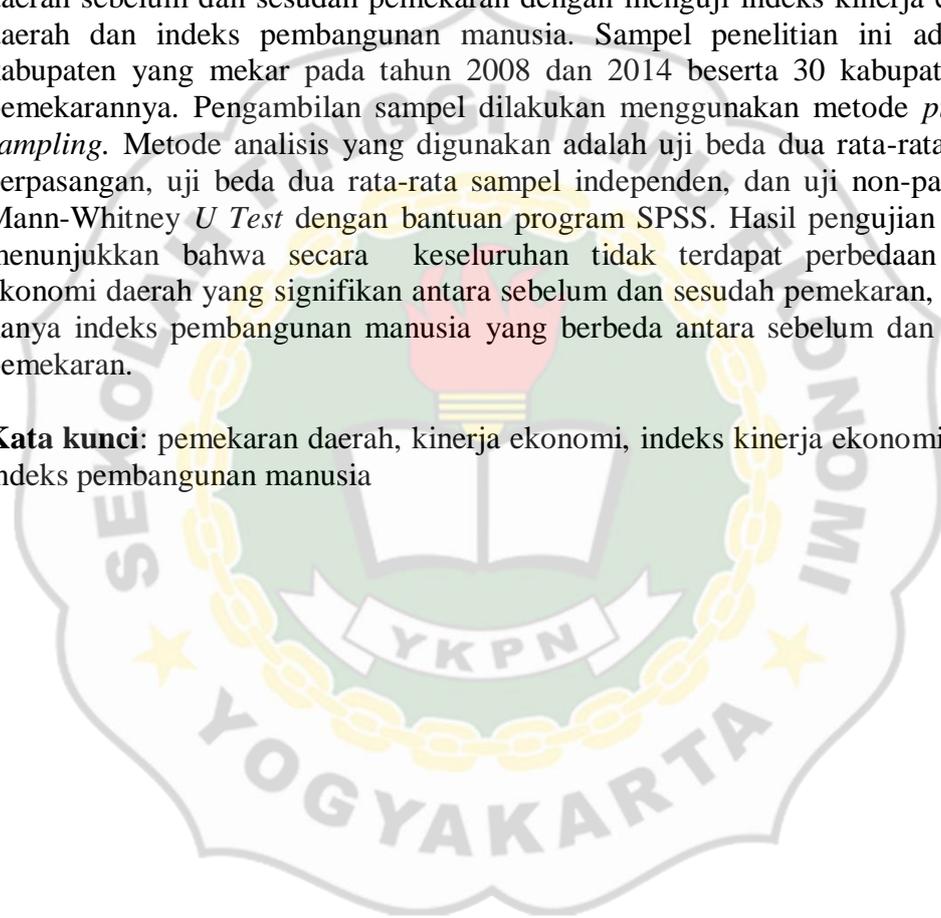
Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja ekonomi daerah sebelum dan sesudah pemekaran dengan menguji indeks kinerja ekonomi daerah dan indeks pembangunan manusia. Sampel penelitian ini adalah 21 kabupaten yang mekar pada tahun 2008 dan 2014 beserta 30 kabupaten hasil pemekarannya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata sampel berpasangan, uji beda dua rata-rata sampel independen, dan uji non-parametric Mann-Whitney *U Test* dengan bantuan program SPSS. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan kinerja ekonomi daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemekaran, di mana hanya indeks pembangunan manusia yang berbeda antara sebelum dan sesudah pemekaran.

**Kata kunci:** pemekaran daerah, kinerja ekonomi, indeks kinerja ekonomi daerah, indeks pembangunan manusia



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

Pemekaran daerah diharapkan dapat mempersempit rentang kendali (*span of control*) antara pemerintah dan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang belum dijangkau fasilitas pemerintahan. Namun demikian, kebijakan pemekaran daerah belum tentu berhasil dalam pelaksanaannya. Penelitian mengenai pemekaran daerah di Indonesia sangatlah diperlukan sebagai evaluasi yang dapat menilai apakah pelaksanaan pemekaran daerah berhasil atau tidak dan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang sesuai di setiap daerah agar pelaksanaan pemekaran daerah mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian mengenai pemekaran daerah telah dilakukan melalui berbagai aspek, salah satunya kinerja ekonomi. Penelitian ini akan memperluas penelitian sebelumnya dengan menambahkan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator dan menggunakan sampel yang jumlahnya lebih banyak, yaitu kabupaten yang mekar dan kabupaten hasil pemekaran pada suatu periode.

## TINJAUAN TEORI

### **Pemekaran Daerah**

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota yang setelahnya menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan daerah dari daerah yang berdekatan dalam satu provinsi menjadi daerah baru. Daerah kabupaten dapat dimekarkan setelah mencapai usia tujuh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP No.78 Tahun 2007

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang merupakan pengganti PP No.129 Tahun 2000, syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemekaran kabupaten.

## **Ketentuan Perundang-Undangan tentang Pemekaran Daerah**

UUD RI 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Selanjutnya, pada tahun 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penjabaran dari UU No.22 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan PP No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pada tanggal 18 Agustus 2000, pasal 18 UUD 1945 mengalami amandemen yang menyebabkan dikeluarkannya Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU No.32 Tahun 2004 untuk menyempurnakan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penjabaran dari UU No.32 Tahun 2004, pemerintah mengeluarkan PP

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah untuk mengganti PP No.129 Tahun 2000 agar lebih sesuai dengan UU terbaru. Namun, setelah beberapa lama, UU No.32 Tahun 2004 tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga disempurnakan dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## **Moratorium Pemekaran Daerah**

*Moratorium* atau penundaan pemekaran DOB diusulkan mulai tahun 2010, namun Komisi II DPR tidak menyetujui keputusan pemerintah tersebut. Pada Februari 2015, *moratorium* tersebut dicabut, namun kemudian *moratorium* pengesahan DOB diberlakukan pada Juni 2015 (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2019).

Pada tahun 2020, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah melanjutkan kebijakan *moratorium* terhadap usulan pemekaran daerah baru. Kebijakan ini didasarkan oleh beberapa hal, di antaranya pendapatan asli daerah yang dihasilkan DOB masih rendah dan kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh kegiatan operasional DOB (Setkab RI, 2020).

## **Kinerja Ekonomi Daerah**

Menurut Bappenas dan UNDP (2008), fokus kinerja ekonomi adalah untuk mengetahui apakah kondisi perekonomian daerah setelah pemekaran mengalami perkembangan atau tidak. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ekonomi adalah pertumbuhan PDRB non-migas, PDRB per kapita, rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi, dan angka kemiskinan.

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (ekonomi).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Indeks Kinerja Ekonomi Daerah**

Penelitian ini akan menganalisis kinerja ekonomi kabupaten sebelum dan sesudah pemekaran untuk melihat apakah ada perbedaan di antara keduanya. Santika *et al.* (2018) menemukan bahwa terdapat perbedaan pada variabel yang merupakan indikator indeks kinerja ekonomi daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, hasil studi oleh Bappenas dan UNDP (2008) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah induk relatif stabil dan meningkat. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H<sub>1A</sub>: Terdapat perbedaan rata-rata indeks kinerja ekonomi daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran

H<sub>1B</sub>: Terdapat perbedaan rata-rata indeks kinerja ekonomi daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia juga diperlukan karena salah satu indikator yang digunakan dalam indeks pembangunan manusia adalah standar hidup (ekonomi).

Yulianita (2013) menemukan bahwa terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia antara Kota Prabumulih sebagai daerah otonom baru dengan daerah induknya. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

H<sub>2A</sub>: Terdapat perbedaan rata-rata indeks pembangunan manusia daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran

H<sub>2B</sub>: Terdapat perbedaan rata-rata indeks pembangunan manusia daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru

## **Perkembangan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah Otonom Baru**

Penulis ingin mengetahui berapa tahun yang dibutuhkan daerah otonom baru untuk mengalami peningkatan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Cahyadinata (2014) terhadap pemekaran daerah pesisir di Provinsi Bengkulu, ditemukan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur indeks kinerja ekonomi manusia mengalami perbaikan setelah pemekaran walaupun pada daerah otonom baru pertumbuhannya lebih rendah dari daerah induk dan cenderung fluktuatif. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut.

H<sub>3A</sub> : Terdapat perbedaan rata-rata indeks kinerja ekonomi daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua

H<sub>3B</sub> : Terdapat perbedaan rata-rata indeks kinerja ekonomi daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Otonom Baru**

Indeks pembangunan manusia daerah otonom baru perlu dibandingkan per tahunnya untuk mengetahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengalami peningkatan. Duri & Rahmah (2020) menemukan bahwa setelah pemekaran, indeks pembangunan manusia Kabupaten Empat Lawang mengalami perbaikan yang cukup stabil. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis keempat sebagai berikut.

H<sub>4A</sub> : Terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua

H<sub>4B</sub> : Terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga

## **METODE PENELITIAN**

### **Sampel dan Data Penelitian**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini, sampel yang dipilih adalah kabupaten yang mekar dan kabupaten hasil pemekarannya pada tahun 2008 dan 2014 yang jumlahnya yaitu 22 daerah induk dan 30 DOB.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa PDRB, angka kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia pada kabupaten mekar dan kabupaten hasil pemekarannya pada tahun 2008 dan 2014. Data sekunder diperoleh melalui laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) yang merupakan situs resmi milik Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data juga diperoleh dari beberapa literatur berupa buku teks, jurnal,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel operasional. Variabel pertama yaitu Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang menggambarkan kinerja ekonomi suatu daerah. Menurut Bappenas dan UNDP (2008), “indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi daerah adalah pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI), PDRB per kapita (WELFI), rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi (ESERI), dan angka kemiskinan (POVEI)”. Indeks kinerja ekonomi daerah pada dasarnya merupakan perpaduan dari keempat indikator tersebut, sebagaimana tercermin dalam rumus berikut:

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ESERI_{i,t} + (1 - POVEI_{i,t}))}{4}$$

Variabel kedua yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Menurut BPS, indeks pembangunan manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (ekonomi).

## Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan data dalam bentuk angka. Berdasarkan teknik analisis tersebut, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Metode yang digunakan dalam penelitian

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini adalah uji beda dua rata-rata sampel berpasangan dan uji beda dua rata-rata sampel independen untuk menguji hipotesis.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif dari Daerah Induk Selama Tiga Tahun Sebelum Pemekaran Daerah (Rata-Rata)**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
IKE	19,97	48,68	34,52	8,63
IPM	51,00	71,89	65,60	4,96

Berdasarkan tabel di atas, variabel rata-rata IKE daerah induk selama tiga tahun sebelum pemekaran daerah memiliki nilai *mean* sebesar 34,52 dan standar deviasi sebesar 8,63 dengan nilai minimum sebesar 19,97 yang merupakan IKE Kabupaten Jayawijaya, sedangkan nilai maksimum sebesar 48,68 yang merupakan IKE Kabupaten Buton. Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 65,60 dan standar deviasi sebesar 4,96 dengan nilai minimum sebesar 51,00 yang merupakan IPM Kabupaten Jayawijaya, sedangkan nilai maksimum sebesar 71,89 yang merupakan IPM Kabupaten Tana Toraja.

**Tabel 2. Analisis Statistika Deskriptif dari Daerah Induk Selama Tiga Tahun Sesudah Pemekaran Daerah (Rata-Rata)**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
IKE	8,82	61,80	35,60	9,89
IPM	55,97	74,10	67,83	4,40

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel di atas, variabel rata-rata IKE daerah induk selama tiga tahun sesudah pemekaran daerah memiliki nilai *mean* sebesar 35,60 dan standar deviasi sebesar 9,89 dengan nilai minimum sebesar 8,82 yang merupakan IKE Kabupaten Painai, sedangkan nilai maksimum sebesar 61,80 yang merupakan IKE Kabupaten Sorong. Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 67,83 dan standar deviasi sebesar 4,40 dengan nilai minimum sebesar 55,97 yang merupakan IPM Kabupaten Jayawijaya, sedangkan nilai maksimum sebesar 74,10 yang merupakan IPM Kabupaten Labuhanbatu.

**Tabel 3. Analisis Statistika Deskriptif dari Daerah Otonom Baru Selama Tiga Tahun (Rata-Rata)**

Variabel	Minimum	Maksimum	<i>Mean</i>	Std. Deviasi
IKE	13,99	27,34	22,96	3,16
IPM	48,03	73,91	61,67	9,28

Berdasarkan tabel di atas, variabel rata-rata IKE daerah otonom baru selama tiga tahun memiliki nilai *mean* sebesar 22,96 dan standar deviasi sebesar 3,16 dengan nilai minimum sebesar 13,99 yang merupakan IKE Kabupaten Deiyai (pemekaran Kabupaten Painai), sedangkan nilai maksimum sebesar 27,34 yang merupakan IKE Kabupaten Sigi (pemekaran Kabupaten Donggala). Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 61,67 dan standar deviasi sebesar 9,28 dengan nilai minimum sebesar 48,03 yang merupakan IPM Kabupaten Nduga (pemekaran Kabupaten Jayawijaya), sedangkan nilai maksimum sebesar 73,91 yang merupakan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan (pemekaran Kabupaten Labuhanbatu).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 4. Analisis Statistika Deskriptif dari Daerah Otonom Tahun Pertama**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
IKE	4,97	28,57	21,08	6,76
IPM	47,70	73,52	61,17	9,37

Berdasarkan tabel di atas variabel rata-rata IKE daerah otonom baru tahun pertama memiliki nilai *mean* sebesar 21,08 dan standar deviasi sebesar 6,76 dengan nilai minimum sebesar 4,97 yang merupakan IKE Kabupaten Deiyai, sedangkan nilai maksimum sebesar 28,57 yang merupakan IKE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow). Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 61,17 dan standar deviasi sebesar 9,37 dengan nilai minimum sebesar 47,70 yang merupakan IPM Kabupaten Nduga, sedangkan nilai maksimum sebesar 73,52 yang merupakan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**Tabel 5. Analisis Statistika Deskriptif dari Daerah Otonom Baru Tahun Kedua**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
IKE	11,60	29,05	23,39	3,95
IPM	48,00	73,84	61,76	9,24

Berdasarkan tabel di atas, variabel rata-rata IKE daerah otonom baru tahun kedua memiliki nilai *mean* sebesar 23,39 dan standar deviasi sebesar 3,95 dengan nilai minimum sebesar 11,60 yang merupakan IKE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan nilai maksimum sebesar 29,05 yang merupakan IKE Kabupaten

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lanny Jaya (pemekaran Kabupaten Jaya Wijaya). Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 61,76 dan standar deviasi sebesar 9,24 dengan nilai minimum sebesar 48,00 yang merupakan IPM Kabupaten Nduga, sedangkan nilai maksimum sebesar 73,84 yang merupakan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**Tabel 6. Analisis Statistika Deskriptif dari Daerah Otonom Baru Tahun Ketiga**

Variabel	Minimum	Maksimum	<i>Mean</i>	Std. Deviasi
IKE	18,53	38,68	24,42	3,87
IPM	48,40	74,38	62,19	9,26

Berdasarkan tabel di atas, variabel rata-rata IKE daerah otonom baru tahun ketiga memiliki nilai *mean* sebesar 24,42 dan standar deviasi sebesar 3,87 dengan nilai minimum sebesar 18,53 yang merupakan IKE Kabupaten Deiyai, sedangkan nilai maksimum sebesar 38,68 yang merupakan IKE Kabupaten Tambrauw (pemekaran Kabupaten Sorong). Variabel rata-rata IPM memiliki nilai *mean* sebesar 62,19 dan standar deviasi sebesar 9,26 dengan nilai minimum sebesar 48,40 yang merupakan IPM Kabupaten Nduga, sedangkan nilai maksimum sebesar 74,38 yang merupakan IPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## Hasil Uji Normalitas

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

Variabel		N	Signifikansi	Keterangan
IKE	Daerah Induk Tiga Tahun Sebelum Pemekaran (Rata-Rata)	21	0,92	Normal

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel		N	Signifikansi	Keterangan
IKE	Daerah Induk Tiga Tahun Sesudah Pemekaran (Rata-Rata)	21	0,71	Normal
	DOB Tiga Tahun (Rata-Rata)	30	0,20	Normal
	DOB Tahun Pertama	30	0,21	Normal
	DOB Tahun Kedua	30	0,39	Normal
	DOB Tahun Ketiga	30	0,39	Normal
IPM	Daerah Induk Tiga Tahun Sebelum Pemekaran (Rata-Rata)	21	0,34	Normal
	Daerah Induk Tiga Tahun Sesudah Pemekaran (Rata-Rata)	21	0,40	Normal
	DOB Tiga Tahun (Rata-Rata)	30	0,00	Tidak Normal
	DOB Tahun Pertama	30	0,19	Normal
	DOB Tahun Kedua	30	0,21	Normal
	DOB Tahun Ketiga	30	0,19	Normal

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi rata-rata IKE daerah induk tiga tahun sebelum pemekaran yaitu 0,92 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi rata-rata IKE daerah induk tiga tahun sesudah pemekaran yaitu 0,71 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi rata-rata IKE daerah otonom baru selama tiga tahun yaitu 0,20 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi IKE daerah otonom baru tahun pertama yaitu 0,21 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi IKE daerah otonom baru tahun kedua yaitu 0,39 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi IKE

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah otonom baru tahun ketiga yaitu 0,39 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal.

Selanjutnya, nilai signifikansi rata-rata IPM daerah induk tiga tahun sebelum pemekaran yaitu 0,34 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi rata-rata IPM daerah besar tiga tahun sesudah pemekaran yaitu 0,40 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi rata-rata IPM daerah otonom baru selama tiga tahun yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak berdistribusi normal, maka data tersebut akan diuji menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney *U Test*. Nilai signifikansi IPM daerah otonom baru tahun pertama yaitu 0,19 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi IPM daerah otonom baru tahun kedua yaitu 0,21 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal. Nilai signifikansi IPM daerah otonom baru tahun ketiga yaitu 0,19 lebih besar dari 0,05 yang berarti berdistribusi normal.

## Hasil Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Berpasangan (*Paired Sample t-Test*)

**Tabel 8. Hasil Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Berpasangan**

### Indeks Kinerja Ekonomi Daerah

Perbandingan	df	Sig.	Keterangan
Daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran	20	0,65	tidak terdapat perbedaan
DOB tahun pertama dan tahun kedua	29	0,91	tidak terdapat perbedaan
DOB tahun pertama dan tahun ketiga	29	0,02	terdapat perbedaan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel di atas, pengujian daerah induk sebelum dengan sesudah pemekaran memiliki nilai signifikansi 0,65 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis pertama ( $H_{1A}$ ) ditolak atau tidak terdapat perbedaan rata-rata IKE daerah induk sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Pengujian DOB tahun pertama dengan tahun kedua memiliki nilai signifikansi 0,91 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ( $H_{3A}$ ) ditolak atau tidak terdapat perbedaan rata-rata IKE DOB tahun pertama dan tahun kedua. Pengujian DOB tahun pertama dengan tahun ketiga memiliki nilai signifikansi 0,02 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ( $H_{3B}$ ) diterima atau terdapat perbedaan rata-rata IKE DOB tahun pertama dan tahun ketiga.

**Tabel 9. Hasil Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Berpasangan Indeks Pembangunan Manusia**

Perbandingan	df	Sig.	Keterangan
Daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran	20	0,00	terdapat perbedaan
DOB tahun pertama dan tahun kedua	29	0,00	terdapat perbedaan
DOB tahun pertama dan tahun ketiga	29	0,00	terdapat perbedaan

Berdasarkan tabel di atas, pengujian daerah induk sebelum dengan sesudah pemekaran memiliki nilai signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis kedua ( $H_{2A}$ ) diterima atau terdapat perbedaan rata-rata IPM daerah induk sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. Pengujian DOB tahun pertama dengan tahun kedua memiliki nilai signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis keempat ( $H_{4A}$ )

diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata IPM DOB tahun pertama dan tahun kedua. Pengujian DOB tahun pertama dengan tahun ketiga memiliki nilai signifikai 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis keempat ( $H_{4B}$ ) diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata IPM DOB tahun pertama dan tahun ketiga.

## Hasil Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Independen (*Independent Sample t Test*) dan Mann-Whitney *U Test*

**Tabel 10. Hasil Uji Beda Dua Rata-Rata Sampel Independen  
Indeks Kinerja Ekonomi Daerah**

Perbandingan	df	Sig.	Keterangan
Daerah induk sesudah pemekaran dan DOB	49	0,00	terdapat perbedaan

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji beda rata-rata sampel independen memperoleh nilai signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis pertama ( $H_{1B}$ ) diterima. Ini berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata indeks kinerja ekonomi daerah antara daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru.

**Tabel 11. Hasil Uji Non-parametrik Mann-Whitney *U Test***

### Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan	<i>Asymp. Sig</i>	Keterangan
Daerah Induk sesudah pemekaran dan DOB	0,19	tidak ada perbedaan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji non-parametrik Mann-Whitney *U* Test diperoleh nilai signifikansi 0,19 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa hipotesis pertama ( $H_{2B}$ ) diterima. Ini berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata indeks pembangunan manusia antara daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Indeks Kinerja Ekonomi Daerah**

Pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata IKE daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran, maka hipotesis pertama ( $H_{1A}$ ) ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah tidak menimbulkan perbedaan kinerja ekonomi yang signifikan pada daerah induk. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat perbedaan jumlah penduduk, pendapatan daerah, dan aspek ekonomi lainnya antara daerah induk sesudah dan daerah otonom baru. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Arianti & Cahyadinata (2014) yang menunjukkan bahwa pada salah satu indikator indeks kinerja ekonomi daerah, yaitu PDRB per kapita terdapat perbedaan antara daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Namun di sisi lain, tidak sejalan karena pada indikator lain, yaitu pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pemekaran.

Pengujian pada IKE daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya, maka hipotesis pertama ( $H_{1B}$ ) diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kebijakan pemekaran daerah menimbulkan perbedaan kinerja ekonomi yang signifikan pada daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Yulianita (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan IKE daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru. Selain itu, hasil penelitian Hakim (2017) menunjukkan bahwa kinerja daerah otonom baru berbeda dengan daerah induk, yang mana lebih rendah dari daerah induknya.

## **Pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata IPM daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran, maka hipotesis kedua ( $H_{2A}$ ) diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah menimbulkan perbedaan indeks pembangunan manusia yang signifikan pada daerah induk. Hasil pengujian ini sependapat dengan hasil Yulianita (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan IPM daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran. Akan tetapi, pengujian pada IPM daerah induk sesudah pemekaran dan daerah otonom baru tidak menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya, maka hipotesis kedua ( $H_{2B}$ ) ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemekaran daerah tidak menimbulkan perbedaan indeks pembangunan manusia pada daerah induk sesudah pemekaran dengan daerah otonom baru. Hal tersebut bisa terjadi karena nilai dari indikator-indikator IPM pada masing-masing daerah relatif sama.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil pengujian ini di sisi lain tidak sejalan dengan hasil penelitian Yulianita (2013) yang menunjukkan bahwa daerah otonom baru mempunyai nilai indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dari daerah induknya yang berarti terdapat perbedaan di antara keduanya.

## **Perkembangan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah Otonom Baru**

Pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan rata-rata IKE daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua, maka hipotesis ketiga ( $H_{3A}$ ) diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kinerja ekonomi daerah otonom baru tidak terjadi pada tahun kedua. Hal ini bisa terjadi karena daerah otonom baru masih berada pada masa transisi, sehingga cukup sulit untuk daerah dalam mengupayakan perubahan kondisi perekonomiannya. Hasil pengujian ini sependapat dengan hasil penelitian Arianti & Cahyadinata (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan angka kemiskinan yang merupakan indikator indeks kinerja ekonomi antara daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua. Namun di sisi lain, tidak sejalan karena terdapat perbedaan indikator lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita antara daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua.

Pengujian pada IKE daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keduanya, maka hipotesis ketiga ( $H_{3B}$ ) diterima. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kinerja ekonomi daerah otonom baru terjadi pada tahun ketiga. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Yulianita (2013) yang menunjukkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bahwa indikator kinerja ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah otonom baru terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti terdapat perbedaan kinerja ekonomi daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga.

## **Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Otonom Baru**

Pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata IPM daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua, maka hipotesis keempat ( $H_{4A}$ ) diterima. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru terjadi pada tahun kedua. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Duri & Rahmah (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru tahun pertama dan tahun kedua. Akan tetapi, hasil pengujian hipotesis keempat ini tidak sependapat dengan penelitian Yulianita (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan IPM yang signifikan pada otonom baru tahun pertama dan tahun kedua. Selain itu, pengujian pada IPM daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keduanya, maka hipotesis keempat ( $H_{4B}$ ) diterima. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru juga terjadi pada tahun ketiga.

Hasil pengujian ini sependapat dengan hasil penelitian Duri & Rahmah (2020) yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru pada tahun ketiga. Selain itu, hasil pengujian ini juga sependapat dengan hasil penelitian Yulianita (2013) yang menunjukkan bahwa peningkatan yang angka IPM yang cukup tinggi terjadi pada tahun ketiga

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berarti terdapat perbedaan indeks pembangunan manusia daerah otonom baru tahun pertama dan tahun ketiga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Indeks kinerja ekonomi daerah induk tidak mengalami peningkatan pasca pemekaran dan indeks kinerja ekonomi daerah otonom baru tidak lebih unggul dari indeks kinerja ekonomi daerah induk. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia daerah induk meningkat pasca pemekaran, namun indeks pembangunan manusia daerah otonom baru tidak lebih unggul dari daerah induk.
2. Indeks kinerja ekonomi daerah otonom baru meningkat pada tahun ketiga walaupun pada tahun kedua tidak berbeda dengan tahun pertama. Selain itu, indeks pembangunan manusia daerah otonom baru meningkat dari tahun pertama sampai tahun ketiga.

### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penulis hanya menggunakan data dengan periode selama tiga tahun sebelum dan sesudah peristiwa pemekaran daerah karena data beberapa daerah periode empat tahun atau lebih sebelum pemekaran tidak tersedia di situs resmi BPS. Sehingga hasil penelitian ini belum mampu

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menunjukkan perbedaan kinerja ekonomi daerah sebelum dan sesudah pemekaran daerah dengan akurat.

## Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk peneliti selanjutnya yaitu agar dalam meneliti dampak pemekaran daerah, menggunakan sampel daerah pemekaran yang terjadi belum lama ini sehingga data-data sebelum pemekaran masih tersedia di situs resmi BPS dan bisa meneliti dengan periode yang cukup lama. Dengan meneliti menggunakan periode yang lama, diharapkan dapat memperoleh hasil temuan yang lebih tepat dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, N., & Cahyadinata, I. (2014). Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Agrisepe*, 13(2), 159-176.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2004-2005*. Diakses pada 13 November 2021, dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/621/9/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2004-2008*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2009-2013*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik. Diakses pada 12 November 2021, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Bappenas dan United Nations Development Programme. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Jakarta: Building and Reinventing Decentralised Governance.
- Dirjen Otda. (2021). *Pembentukan Daerah-Daerah di Indonesia sampai dengan Tahun 2014*. Diakses pada 12 November 2021, dari <http://otda.kemendagri.go.id/po-content/uploads/publikasi/1.pdf>.
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 43–52.
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. (2017). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon*, 4(1), 843–857.
- Hidayat, F., Noer, M., & Adrimas. (2020). Analisis Pemekaran Daerah terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Induk Kabupaten Solok. *Menara Ilmu*, 14(1), 60–76.
- Humas Setkab. (2020, December 4). *Wapres: Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah*. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://setkab.go.id/wapres-pemerintah-masih-lakukan-moratorium-pemekaran-daerah/>.
- Kemendagri. (2015). *Ini Penyebab DOB Gagal*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12304/ini-penyebab-dob-gagal>.
- KPPOD. (2014). *Pemekaran Daerah Belum Menjadi Solusi*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=388>.
- KPPOD. (2015). *Menimbang Keberlanjutan Moratorium*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Diakses pada 18 Januari 2022, dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=699>.
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(5), 27–39.
- Mariani, L. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Pemekaran Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat)*. Program Sarjana Universitas Negeri Padang.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Masan, E. L., & Nuryadin, M. R. (2020). Dampak Pemekaran Daerah terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 600–621.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang *Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
- Salim, M. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Pemekaran. *Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 436–451.
- Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 15–23.
- Soamole, F., Mangantar, M., & Tulung, J. E. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Taliabu. *Jurnal EMBA*, 6(3), 1588–1597.
- Sriastuti, P., & Muta'ali, L. (2016). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Analisa BPK. *Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)*. Diakses pada 4 Desember 2021, dari [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd\\_Analisis\\_tentang\\_Pemekaran\\_Daerah20130306170435.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdpd_Analisis_tentang_Pemekaran_Daerah20130306170435.pdf).
- Towa, M. F. W., & Halim, A. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran. *Jurnal RIset Manajemen*, 1(2), 105–115.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Widiyanto, M. A. (2013). *Statistika Terapan: Konsep & Aplikasi SPSS/LISREL dalam Penelitian Pendidikan, Psikologi & Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yulianita, A. (2013). Analisis Kinerja Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim (Kota Induk) Dengan Kota Prabumulih (Kota Baru). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 34–53.
- Yusnitasari, S., Risyanto, R., & Muta'ali, L. (2013). Analisis Fasilitas Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3), 222–232.

